



Kushandajani

A
15

Makna

Otonomi Daerah

DI WILAYAH LAUT
BAGI MASYARAKAT PESISIR



Kushandajani

Makna **Otonomi Daerah**

DI WILAYAH LAUT
BAGI MASYARAKAT PESISIR



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Diponegoro Semarang

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Kushandajani

Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir /
Kushandajani, -cet 1- Semarang; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, 2011

xvi + 136 hlm, 21 cm.

ISBN: 978-602-99912-0-8

Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut bagi Masyarakat Pesisir

Penulis:

Kushandajani

Desain Isi:

Mustaqim

Desain Sampul:

Abu Fadhel

Penerbit:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faximail (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>

email : fisip@undip.ac.id

ISBN: 978-602-99912-0-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

All rights reserved

Cetakan Pertama, Januari 2011



Makna

Otonomi Daerah

DI WILAYAH LAUT BAGI MASYARAKAT PESISIR

Nelayan, dengan berbagai bentuk kelompok yang ada, merupakan representasi dari kehidupan masyarakat pesisir. Predikat yang disandang nelayan sebagai masyarakat miskin dari yang termiskin (poorest of the poor) disertai konflik yang selalu hadir di sekitarnya akan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka karena ketidakberdayaannya (powerless). Meski bisa jadi itu hanyalah stigma yang muncul, namun dalam kenyataannya tetaplah menarik untuk menyimak kehidupan nelayan dengan segala problematikanya.

Modal dasar pemberdayaan masyarakat pesisir sebenarnya masih sangat kuat. Masyarakat memiliki cara-cara mereka sendiri dalam mengelola tata kehidupan dengan dasar saling peduli dan saling percaya. Bahkan konflik akar rumput bisa diatasi melalui cara musyawarah.

Namun, potensi sosial budaya tersebut tidak mampu digunakan sebagai dasar bagi usaha-usaha ke arah pemberdayaan politik dan ekonomi. Secara politik, melalui potensi sosial budaya yang ada seharusnya bisa menghasilkan partisipasi warga nelayan untuk ikut ambil peran dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. Dari aspek ekonomi pun, potensi sosial budaya tidak termanfaatkan dengan baik untuk menciptakan modal ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Haruslah disadari, sekuat dan sebesar apapun modal sosial yang dimiliki, namun jika tidak mampu diubah menjadi modal ekonomi, maka modal sosial tersebut menjadi tidak termanfaatkan.



Kushandajani, lahir di Purwokerto, 14 Juni 1962. S1 Ilmu Pemerintahan diraih di UNDIP tahun 1985, gelar Magister Ilmu Politik di raih dari Universitas Indonesia tahun 1990. Gelar Doktor di bidang Hukum diperoleh dari UNDIP tahun 2006

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Diponegoro Semarang

ISBN 978-602-99912-0-8

